

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang melakukan banyak pembangunan disegala aspek demi mewujudkan masyarakat yang makmur dan sejahtera. Dalam upaya tercapainya target pembangunan nasional yang merata tentunya bukan hal yang mudah. Pemerintah berkebijakan memberikan wewenang kepada masing – masing daerah untuk dapat mengatur pembangunan dan perekonomiannya sendiri sehingga setiap daerah diharapkan dapat mandiri dalam mengelola dan mengatur perekonomiannya atau dikenal dengan Otonomi Daerah. Peraturan tersebut tertera dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah. dalam pasal tersebut di jelaskan bahwa definisi Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk menjalankan suatu pembangunan daerah tentunya dibutuhkan suatu sumber pendapatan. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari hasil Retribusi Daerah, Hasil Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah, Dana Perimbangan dan Hasil lain-lain yang sah.

Dari berbagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pajak merupakan salah satu penyumbang terbesar dalam pencapaian target pendapatan daerah. Seperti yang terdapat pada Provinsi Jawa Timur, sektor pajak merupakan penyumbang kontribusi terbesar pada penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam Undang – Undang nomer 28 tahun 2009 menjelaskan bahwa Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan pengertian Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Salah satu sumber pajak daerah yang dikelola oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur adalah pajak kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor dikenakan kepada orang pribadi maupun badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor dan akan menjadi wajib pajak jika yang bersangkutan sudah memenuhi peraturan perundang – undangan perpajakan. Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor ditentukan oleh hasil perkalian dari 2 unsur pokok yaitu Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) yang ditetapkan berdasarkan harga pasaran umum kendaraan bermotor yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat dan bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor. Nilai jual kendaraan

yang dijadikan dasar pengenaan pajak adalah nilai jual yang ditetapkan berdasarkan peraturan menteri dalam negeri. nilai jual tersebut akan ditinjau setiap tahunnya. Pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor. pemerintah provinsi dibantu oleh beberapa kantor cabang wilayah yang tersebar diseluruh wilayah Jawa Timur. Dari data pemerintah dapat disimpulkan bahwa kepemilikan kendaraan bermotor mengalami peningkatan yang pesat setiap tahunnya. Bertambahnya pengguna kendaraan bermotor tentunya memberi dampak yang cukup besar terhadap pendapatan daerah. peningkatan kepemilikan kendaraan bermotor tersebut diharapkan dapat membantu tercapaian target pendapatan daerah melalui penyetoran pajak kendaraan yang dilakukan oleh wajib pajak. Dalam sistemnya wajib pajak kendaraan diharuskan melakukan penyetoran pajak kendaraan bermotor di Samsat terdekat atau melalui Samsat online sebelum masa pajaknya berakhir. namun pada kenyataannya terdapat beberapa data yang menyatakan bahwa terjadi penunggakan objek pajak di berbagai daerah. Banyak faktor penyebab penunggakan tersebut. salah satu penyebabnya adalah karena kurangnya kepatuhan wajib pajak dan kesadaran atas pembayaran pajak itu sendiri. Penunggakan pajak kendaraan ini tentu berpengaruh akan pendapatan pajak daerah untuk mencapai target yang diharapkan. Pemerintah pun tidak bisa memaksimalkan pendapatan dari sektor ini. Dalam upaya memaksimalkan penerimaan pajak kendaraan bermotor dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Gubernur Jawa Timur mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2016 tentang pemberian keringanan dan pembebasan pajak

kendaraan bermotor untuk masyarakat Jawa Timur atau sering disebut dengan kebijakan pemutihan.

Pemutihan pajak kendaraan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh Negara guna menertibkan para wajib pajak yang telah lama tidak membayarkan kewajibannya dalam membayar pajak kendaraan dengan cara tidak atau menghapus beban denda keterlambatan pembayaran selama periode tertentu. Dalam upaya ini pemerintah daerah bertujuan untuk menarik minat masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Dalam program ini pemerintah berharap dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan menambah pendapatan daerah.

Berdasarkan uraian di atas penulis ingin menganalisa pengaruh program pemutihan tersebut dengan target pendapatan daerah yang telah di susun oleh pemerintah dengan memberi judul penelitian **“ANALISIS KEEFEKTIFAN PEMUTIHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA TERHADAP PENCAPAIAN TARGET PENDAPATAN DAERAH WILAYAH SURABAYA SELATAN”**

1.2.Tujuan Studi Lapang

Berdasarkan Latar Belakang yang telah diuraikan di atas. maka tujuan studi lapang ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tingkat keefektifan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua di UPT Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Wilayah Surabaya Selatan.
2. Untuk menganalisis pengaruh program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua terhadap upaya pemerintah untuk meningkatkan minat akan kewajiban penyetoran pajak kendaraan bermotor roda dua.
3. Untuk mengetahui pengaruh penerapan program pemutihan pajak kendaraan roda dua terhadap pendapatan daerah dan pencapaian target yang di inginkan.

1.3. Manfaat Studi Lapang

Manfaat yang penulis harapkan dalam studi lapang ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat bagi Penulis :

Menambah wawasan tentang pengaruh pemutihan pajak kendaraan roda dua terhadap tercapainya target pendapatan daerah kota Surabaya Selatan dan dampak pemutihan pajak kendaraan roda dua bagi kepatuhan dan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak.

2. Manfaat bagi STIESIA :

Penelitian ini di harapkan dapat memberi manfaat secara teoritis sebagai tolak ukur dan referensi untuk penelitian yang berkaitan tentang pemutihan pajak kendaraan dan penyetoran pajak kendaraan bagi mahasiswa STIESIA di kemudian hari.

3. Manfaat bagi Pemerintah Kota Surabaya :

Penelitian ini di harapkan dapat memberi sumbangan pemikiran kepada Pemerintah Daerah Kota Surabaya tentang keefektivan pemutihan pajak kendaraan bermotor roda dua di kota Surabaya.

1.4. Ruang Lingkup Studi Lapang

Dalam penulisan tugas akhir ini. Penulis memberikan batasan ruang lingkup studi lapang dengan menitikberatkan permasalahan yang akan di bahas yaitu analisis keefektifan pemutihan pajak kendaraan bermotor roda dua terhadap pencapaian target pendapatan daerah kota Surabaya. Adapun ruang lingkup studi lapang ini membahas tentang pendapatan yang di terima atas pajak kendaraan bermotor roda dua. pendapatan atas program pemutihan pajak kendaraan bermotor roda dua dan pencapaian target pendapatan daerah kota Surabaya.

1.5. Metode Pengumpulan Data

Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Penelitian deskriptif ialah jenis penelitian yang memberikan gambaran atau penjelasan atas suatu keadaan se jelas mungkin tanpa ada perlakuan terhadap objek yang diteliti. Penulis memilih tipe analisis deskriptif karena pada awalnya penulis akan menjelaskan hal – hal yang berkaitan dengan pengertian pajak. Objek dan Subjek pajak. tata cara perhitungan pajak kendaraan. dll.

Adapun teknik pengumpulan data yang akan penulis gunakan adalah sebagai berikut :

1. Studi Pustaka

Dalam teknik ini, penulis melakukan studi perpustakaan dimana penulis akan membaca, mencatat dan mengutip sumber materi yang berkaitan tentang pajak kendaraan bermotor roda dua. Sumber materi yang di ambil dapat berupa buku maupun data dari internet.

2. Observasi

Teknik pengamatan (Observasi), yaitu dengan cara mengamati langsung ke tempat untuk mencari informasi secara langsung kegiatan pelaporan pajak kendaraan bermotor roda dua di Samsat Surabaya

3. Wawancara

Penulis melakukan tanya jawab kepada beberapa sumber untuk mencari data yang akurat sebagai acuan dalam perbandingan materi dan realisasi dalam pelaksanaan pemutihan pajak kendaraan bermotor roda dua.

4. Dokumentasi

Penulis mengumpulkan data dengan cara mengumpulkan data yang berkaitan dengan berapa banyak wajib pajak yang membayar pajak kendaraan bermotor roda dua saat program pemutihan dan data tentang pencapaian target pendapatan daerah kota Surabaya.

1.6. Jadwal Studi Lapang

- **Jadwal Pelaksanaan Studi Lapang**

Studi Lapang ini akan di lakukan pada tanggal 1 Januari – 31 Januari 2018

- **Tempat Studi Lapang**

Studi lapang ini akan dilaksanakan di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur.

- **Alamat Studi Lapang**

Jl. Manyar Kertoarjo No. 1, Kota Surabaya, Jawa Timur

- **Peserta Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan**

Nama : Therezia Tri Rahayu

NPM : 1510400984

Program Studi : Diploma Tiga Manajemen Perpajakan

Jurusan : Manajemen Perpajakan

Alamat : Jl. Menur gg. III No. 37 Surabaya

Email : Therezia213121@gmail.com

No. HP : 085645677451